

Peran Kebijakan Investasi dalam Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sigi

Fany Arista Handayani¹, Burhanuddin², Henni Mande³, Rosnani Said⁴

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

⁴Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara

fany.arista.handayani29@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kunci kemandirian fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Kabupaten Sigi memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam, namun kontribusi PAD masih relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam mendukung peningkatan PAD dan merumuskan strategi kebijakan investasi yang berkelanjutan. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan desain deskriptif, menggunakan data sekunder dari dokumen hukum, literatur ilmiah, dan publikasi resmi pemerintah. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada kerangka SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) untuk merumuskan strategi peningkatan PAD berdasarkan potensi internal dan peluang eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Sigi berperan strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Namun, keterbatasan cakupan regulasi, minimnya pedoman teknis, dan belum optimalnya diversifikasi sektor menjadi tantangan utama. Strategi kebijakan investasi yang diusulkan menekankan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan modal sosial masyarakat, pengembangan sektor unggulan berbasis komunitas, digitalisasi layanan fiskal dan perizinan, serta penguatan infrastruktur dan tata kelola investasi.

ABSTRACT

Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD) is a key indicator of fiscal independence and a measure of local government capacity to finance development and public services. Sigi Regency possesses significant economic potential, particularly in the agricultural, tourism, and natural resource-based industrial sectors, yet its PAD contribution remains relatively low compared to transfers from the central government. This study aims to analyze the role of investment policies of the Sigi Regency Government in supporting PAD enhancement and to formulate sustainable investment policy strategies. The study employs a qualitative approach with a descriptive design, utilizing secondary data from legal documents, academic literature, and official government publications. Analysis is conducted descriptively using the SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) framework to develop PAD improvement strategies based on internal potential and external opportunities. The results indicate that investment policies in Sigi Regency play a strategic role in strengthening regional fiscal capacity through the management of agriculture, mining, and tourism sectors. However, limited regulatory coverage, lack of technical guidelines, and suboptimal sectoral diversification remain major challenges. The proposed investment policy strategies emphasize the utilization of natural resource potential and social capital, development of community-based leading sectors, digitalization of fiscal and licensing services, and strengthening investment infrastructure and governance.



Volume 10

Nomor 2

Halaman 369-380

Makassar, Desember 2025

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

19 November 2025

Tanggal diterima

28 November 2025

Tanggal dipublikasi

1 Desember 2025

Kata kunci :

Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan Investasi, Kemandirian Fiskal, SOAR

Keywords :

Regional Original Revenue, Investment Policy, Fiscal Independence, SOAR

Mengutip artikel ini sebagai : Handayani, F.A., Burhanuddin, Mande, H., Said, R. 2025. Peran Kebijakan Investasi dalam Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sigi. Tangible Jurnal, 10, No. 2, Desember 2025, Hal. 369-380. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.702>.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kunci kemandirian fiskal sekaligus cerminan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam kerangka desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan sumber sumber pendapatan yang sah guna meminimalkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian fiskal tidak hanya menentukan stabilitas keuangan daerah, tetapi juga memengaruhi kemampuan pemerintah merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Salah satu pendorong utama peningkatan PAD adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Muliana et al., 2024), diantaranya adalah menarik dan mengelola investasi. Investasi, baik yang berasal dari sektor swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun skema kemitraan publik-privat, tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga menimbulkan dampak tidak langsung berupa pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan investasi yang komprehensif meliputi regulasi yang adaptif, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, serta dukungan infrastruktur akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor. Sebaliknya, kebijakan yang tidak konsisten atau kurang responsif dapat menjadi hambatan signifikan bagi arus investasi.

Kabupaten Sigi, salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki potensi ekonomi yang besar terutama pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam. Potensi ini seharusnya menjadi modal strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan PAD. Namun, kontribusi PAD Kabupaten Sigi hingga kini masih terbatas dan belum sebanding dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tantangan struktural, termasuk efektivitas kebijakan investasi daerah, yang perlu dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran kebijakan investasi dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Sigi dan menawarkan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan kemandirian fiskal.

Secara teoretis, PAD dipahami sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Halim (2018) menegaskan bahwa PAD merupakan indikator kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri, sedangkan Mahmudi (2019) menambahkan bahwa kontribusi PAD yang tinggi memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Sumber PAD diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan empat kelompok utama: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah. Tingkat penerimaan PAD dipengaruhi oleh kebijakan fiskal daerah, aktivitas perekonomian lokal, dan arus investasi (Siahaan, 2020).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, investasi merupakan pengeluaran untuk menambah stok modal yang mendorong pertumbuhan jangka panjang (Todaro & Smith, 2020). Pada level daerah, Kuncoro (2018) mendefinisikan investasi sebagai penanaman modal oleh pemerintah, BUMD, maupun pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas layanan masyarakat. Sukirno (2019) menekankan bahwa peningkatan investasi memunculkan efek pengganda (multiplier

effect) terhadap pendapatan masyarakat dan pada gilirannya menambah potensi pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan investasi daerah dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan, program, dan insentif yang disusun untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di Indonesia, kebijakan penanaman modal diatur melalui Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan kesetaraan perlakuan bagi investor domestik dan asing, serta didukung oleh implementasi Online Single Submission (OSS) sebagai mekanisme perizinan terpadu. Pemerintah daerah dituntut menyesuaikan regulasi lokal agar sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, penguatan peran BUMD, dan penyediaan infrastruktur pendukung investasi.

Sejumlah penelitian empiris menegaskan korelasi positif antara kebijakan investasi dan pertumbuhan PAD. Wahyuni et al. (2024) membuktikan bahwa kemudahan perizinan dan insentif fiskal mendorong peningkatan investasi swasta sekaligus memperluas basis pajak daerah. Nurhadi (2018) menemukan bahwa optimalisasi peran BUMD sebagai instrumen investasi publik berkontribusi nyata terhadap PAD melalui dividen dan efek pengganda ekonomi. Temuan serupa disampaikan oleh Lestari dan Widodo (2021) yang menunjukkan bahwa investasi di sektor pariwisata meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memfokuskan diri pada dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana peran kebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam mendukung peningkatan PAD, dan (2) bagaimana strategi kebijakan investasi dapat dirancang untuk memperkuat peningkatan PAD Kabupaten Sigi secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan investasi dalam mendorong peningkatan PAD Kabupaten Sigi serta merumuskan strategi kebijakan investasi yang relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan memperkaya literatur mengenai hubungan kebijakan investasi dan peningkatan PAD dalam kerangka otonomi daerah; secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam merancang kebijakan investasi yang efektif, adaptif, dan berbasis potensi lokal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses, makna, dan konteks kebijakan investasi daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi. Pendekatan ini sejalan dengan penjelasan Moleong (2019) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menafsirkan fenomena sosial dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Sementara itu, desain deskriptif sebagaimana dijelaskan Nazir (2014) digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sebagai landasan dalam penyusunan strategi yang relevan dengan kondisi empiris.

Pengumpulan Data

Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder melalui kajian literatur. Sumber tersebut mencakup dokumen hukum dan kebijakan pada tingkat daerah maupun nasional, literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal, serta laporan resmi pemerintah yang menyajikan statistik terkait PAD Kabupaten Sigi.

Penggunaan data sekunder melalui pendekatan studi literatur dinilai mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebagaimana ditegaskan oleh Zed (2014) mengenai pentingnya penalaran sistematis dalam penelitian berbasis pustaka.

Metode Analisis

Fokus analisis meliputi identifikasi kebijakan investasi pemerintah daerah, penelaahan keterkaitan kebijakan tersebut dengan upaya peningkatan kemandirian fiskal, serta perumusan strategi optimalisasi PAD melalui Analisis SOAR : *Strengths* (kekuatan), *Opportunities* (peluang), *Aspirations* (aspirasi), dan *Results* (hasil). Kerangka strategis SOAR, sebagaimana dijelaskan oleh Stavros dan Hinrichs (2009), dipilih karena mampu memberikan pendekatan konstruktif yang menekankan pada pemanfaatan kekuatan internal dan peluang eksternal, sekaligus mengarahkan aspirasi daerah pada hasil yang terukur.

Proses analisis data dilakukan dengan berpedoman pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahap utama: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan informasi relevan; (2) penyajian data, yaitu penyusunan informasi secara sistematis untuk memudahkan interpretasi; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan makna dan pola dari data yang telah dianalisis.

Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber (Moleong, 2019), yakni membandingkan informasi dari berbagai dokumen pemerintah, literatur ilmiah, serta regulasi nasional guna memastikan konsistensi, validitas, dan reliabilitas hasil penelitian. Teknik asosiatif terhadap penelitian diterapkan dalam penelitian ini. Sugiyono (2018) mendefinisikan pendekatan asosiatif sebagai strategi kuantitatif yang memanfaatkan dua variabel atau lebih untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kebijakan Investasi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Secara teoretis, Musgrave dan Musgrave (1989) melalui konsep *fiscal capacity* menegaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan potensi ekonomi lokal dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Investasi pemerintah, baik dalam bentuk pembangunan fisik, penguatan kelembagaan, maupun penetapan regulasi, berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya memperluas basis pajak dan retribusi. Dengan demikian, kebijakan investasi tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Dalam konteks Kabupaten Sigi, kerangka regulasi yang telah diterbitkan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengarahkan investasi ke sektor sektor potensial. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa kekayaan mineral merupakan potensi utama PAD, sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian agar

aktivitas pertambangan memberikan manfaat fiskal yang optimal. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi investor dan menetapkan mekanisme retribusi serta pajak yang secara langsung meningkatkan penerimaan asli daerah. Pada sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Koperasi Berbasis Pertanian menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap penguatan permodalan koperasi petani. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial ekonomi yang tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan petani dan menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, tetapi juga memperluas potensi penerimaan pajak dan retribusi dari aktivitas ekonomi pertanian yang lebih produktif.

Selain sektor pertanian dan pertambangan, pariwisata menjadi pilar strategis lain yang selaras dengan visi Kabupaten Sigi sebagai daerah “Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata Maju.” Potensi pariwisata Sigi meliputi keindahan alam pegunungan, air terjun, dan kawasan agrowisata yang unik serta budaya lokal yang kaya. Sektor ini mampu menciptakan rantai nilai ekonomi yang luas, mulai dari usaha perhotelan, restoran, transportasi, hingga kerajinan rakyat, yang seluruhnya menjadi basis penerimaan pajak dan retribusi. Penelitian oleh Putri dan Darmawan (2020) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa pengembangan destinasi ekowisata berbasis komunitas meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD melalui retribusi wisata, pajak hotel, dan restoran, sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal.

Upaya optimalisasi pendapatan daerah semakin dipertegas melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang mengatur mekanisme pemungutan berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Reklame. Kejelasan prosedur pemungutan pajak yang tertuang dalam peraturan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pemungutan, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kepastian hukum dan tata kelola fiskal daerah yang lebih transparan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah menempatkan kebijakan investasi sebagai instrumen penting untuk memperluas basis pajak dan memperkuat sumber penerimaan asli daerah, termasuk melalui sektor pariwisata.

Meskipun terjadi pertumbuhan, kontribusi PAD Kabupaten Sigi masih relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sigi hanya mencapai Rp81,83 miliar dari total pendapatan Rp1,27 triliun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan investasi yang telah ditempuh, meskipun strategis, belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan fiskal daerah. Hasil penelitian Priambodo (2021) menegaskan bahwa kebijakan investasi daerah yang memprioritaskan sektor unggulan seharusnya memberikan dampak ganda, yakni menciptakan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja sekaligus memperbesar basis pajak dan retribusi daerah. Annisa et al., (2025) juga menekankan bahwa kepastian hukum dan praktik *good governance* menjadi faktor kunci dalam menarik investasi swasta dan memastikan keberlanjutan penerimaan PAD.

Secara teoretis, kebijakan investasi di Kabupaten Sigi sejalan dengan kerangka teori *endogenous growth* yang menekankan pentingnya investasi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Romer, 1990; Lucas, 1988). Investasi pemerintah di sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, dan pariwisata, ditambah penguatan infrastruktur perpajakan, dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta memperluas objek pajak. Ketika pertumbuhan ekonomi lokal meningkat,

aktivitas ekonomi yang lebih luas akan menghasilkan basis pajak yang semakin besar dan meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Kajian kajian dari Indonesia turut memperkuat temuan ini. Penelitian Mulyani dan Setiawan (2020) tentang peran kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa regulasi yang memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan mampu meningkatkan investasi pariwisata dan secara signifikan mendongkrak PAD. Studi Sulistyowati (2010) di Jawa Tengah membuktikan bahwa investasi pemerintah dalam pengolahan hasil pertanian mendorong tumbuhnya industri pengolahan, meningkatkan pendapatan petani, dan memperbesar kontribusi pajak serta retribusi daerah. Kurniawan (2020) juga menyoroti bahwa keterbatasan inovasi regulasi di tingkat daerah menjadi hambatan utama peningkatan kapasitas fiskal dan menyarankan perlunya kebijakan investasi yang lebih komprehensif dan terarah.

Walaupun demikian, kebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi masih menghadapi beberapa tantangan penting. Jumlah kebijakan yang secara khusus mengatur dan mendorong investasi masih relatif terbatas. Regulasi yang telah ada cenderung berfokus pada sektor pertambangan dan penyertaan modal koperasi, sementara sektor lain yang juga memiliki potensi besar seperti pariwisata, industri kreatif, dan jasa modern belum tersentuh secara memadai. Minimnya kebijakan yang diarahkan pada diversifikasi sektor berpotensi menimbulkan ketergantungan pada pendapatan dari sektor tertentu, sehingga PAD menjadi rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan nasional. Selain itu, beberapa peraturan yang sudah diterbitkan belum sepenuhnya dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan pedoman teknis yang rinci. Kekosongan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi calon investor, menghambat proses implementasi kebijakan, dan menurunkan daya tarik investasi daerah.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat upaya positif dalam menciptakan landasan hukum bagi investasi, Pemerintah Kabupaten Sigi perlu memperluas cakupan kebijakan investasi dan memperkuat kerangka implementasi. Temuan Kurniawan (2020) mengenai hambatan banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam memperluas kapasitas fiskal akibat kurangnya inovasi regulasi sejalan dengan kondisi yang dihadapi Sigi. Ke depan, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun kebijakan investasi yang lebih komprehensif, tidak hanya pada sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan, tetapi juga pada sektor pariwisata, jasa, dan industri kreatif, disertai dengan pedoman teknis yang jelas untuk mempercepat realisasi investasi.

Strategi Perancangan Kebijakan Investasi untuk Memperkuat Peningkatan PAD Kabupaten Sigi secara Berkelanjutan

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi menuntut perancangan kebijakan investasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga memiliki orientasi keberlanjutan jangka panjang. Dalam perspektif teori *fiscal capacity* (Musgrave & Musgrave, 1989), kapasitas fiskal daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi pendapatan asli serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Selaras dengan hal tersebut, teori *endogenous growth* (Romer, 1990; Lucas, 1988) menegaskan bahwa investasi publik, pemanfaatan potensi unggulan, dan akumulasi modal manusia merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Landasan teoretis ini diperkuat oleh kerangka hukum nasional, di antaranya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menekankan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan efisiensi berkeadilan; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur desentralisasi fiskal; serta Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang menyediakan kemudahan perizinan melalui digitalisasi layanan.

Dalam konteks Kabupaten Sigi, kekuatan fundamental tidak semata mata terletak pada aspek regulasi, melainkan pada potensi sumber daya alam dan sosial ekonomi yang signifikan. Sektor pertanian memiliki lahan subur dengan komoditas hortikultura dan perkebunan bernilai ekonomi tinggi yang berpotensi menopang ketahanan pangan sekaligus memenuhi permintaan pasar domestik. Di samping itu, bentang alam yang memuat panorama pegunungan, air terjun, dan keanekaragaman hayati menjadikan pariwisata alam terutama ekowisata sebagai sektor unggulan yang berpotensi menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal. Modal sosial masyarakat, berupa keberadaan koperasi, kelompok tani, dan tradisi gotong royong yang kuat, berperan sebagai faktor pendukung investasi berbasis komunitas serta sebagai prasyarat penting untuk memperluas basis penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, ketersediaan tenaga kerja lokal yang relatif melimpah memberikan peluang bagi pengembangan usaha berbasis padat karya, baik pada sektor pertanian maupun pariwisata, sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus memperkuat basis pajak. Dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan desentralisasi fiskal dan program penguatan ekonomi daerah juga membuka ruang yang lebih luas bagi Kabupaten Sigi untuk mengakselerasi realisasi investasi dan memperkuat kemandirian fiskal di masa depan. Peluang eksternal semakin terbuka dengan meningkatnya permintaan komoditas pertanian dan produk wisata alam di tingkat nasional, disertai dukungan kebijakan pemerintah pusat yang menekankan kemandirian fiskal, serta kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan digitalisasi pelayanan perizinan dan administrasi fiskal. Kondisi ini memberikan ruang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sigi untuk memperluas basis investasi sekaligus melakukan diversifikasi sektor unggulan, khususnya pada bidang pariwisata dan industri kreatif. Temuan empiris memperkuat relevansi strategi ini. Penelitian Ariani dan Utama (2022) di Bali menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD kabupaten/kota. Temuan serupa diperoleh Patendeng dkk. (2023) di Kabupaten Toraja Utara, yang membuktikan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan keberadaan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD, meskipun variabel jumlah hotel tidak selalu memberikan dampak yang sama. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa pariwisata dapat menjadi instrumen strategis dalam memperluas basis pajak daerah.

Namun demikian, penelitian Antonia Klara dkk. (2021) di Kabupaten Jayapura mengingatkan bahwa peningkatan investasi pemerintah daerah melalui aset tetap dan penyertaan modal tidak secara otomatis meningkatkan PAD apabila tidak diikuti pengelolaan dan regulasi yang efektif. Temuan ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan investasi tidak hanya bergantung pada besaran investasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola, konsistensi kebijakan, dan kejelasan pedoman pelaksanaannya.

Aspirasi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sigi diarahkan pada pencapaian kemandirian fiskal melalui peningkatan kontribusi PAD dari 6,4% (realisasi APBD 2023) menjadi sekurang kurangnya 15% dalam lima tahun mendatang. Aspirasi ini disertai dengan pengembangan sektor baru, khususnya pariwisata dan industri kreatif, sebagai penguatan basis ekonomi lokal sekaligus pengurangan ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Keberhasilan strategi kebijakan investasi akan diukur melalui indikator peningkatan PAD yang berkelanjutan, pertumbuhan jumlah dan kualitas investasi produktif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan terciptanya lapangan kerja baru.

Analisis SOAR Kabupaten Sigi

Analisis Strengths (Kekuatan), Opportunities (Peluang), Aspiration (aspirasi) dan Result (hasil) pada Kabupaten Sigi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.

Analisis SOAR Kabupaten Sigi

Komponen	Uraian
Strengths (Kekuatan)	Potensi sumber daya pertanian (padi, hortikultura, dan perkebunan) dan pariwisata alam (pegunungan, air terjun, ekowisata) yang memiliki daya tarik ekonomi tinggi; modal sosial masyarakat melalui koperasi dan kelompok tani yang mendorong investasi berbasis komunitas.
Opportunities (Peluang)	Tren peningkatan permintaan produk pertanian dan wisata alam; dukungan kebijakan nasional untuk kemandirian fiskal; serta kemajuan teknologi digital yang mempermudah perizinan dan layanan fiskal.
Aspirations (Aspirasi)	Terwujudnya kemandirian fiskal dengan kontribusi PAD minimal 15% dalam lima tahun; pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif secara berkelanjutan; terbangunnya tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel.
Results (Hasil yang Diharapkan)	Peningkatan PAD secara berkelanjutan; pertumbuhan jumlah dan kualitas investasi produktif; peningkatan kepatuhan pajak; terciptanya lapangan kerja baru; dan munculnya iklim investasi yang berdaya saing tinggi.

Sumber : Data diolah 2025

Tabel 2.

Hubungan Antar Komponen SOAR Kabupaten Sigi

<i>Strengths – Opportunities</i> (SO)	Sinergi potensi pertanian dan pariwisata dengan tren permintaan nasional serta kemajuan teknologi memungkinkan perluasan basis PAD secara berkelanjutan.
<i>Strengths – Aspirations</i> (SA)	Pemanfaatan potensi alam dan modal sosial menjadi landasan untuk mencapai aspirasi kemandirian fiskal dan diversifikasi sektor unggulan sesuai visi “Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata Maju”.
<i>Strengths – Results</i> (SR)	Optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata secara langsung mendorong peningkatan PAD $\geq 15\%$, menciptakan lapangan kerja baru, dan menambah investasi produktif.
<i>Opportunities – Aspirations</i> (OA)	Peluang eksternal, termasuk dukungan kebijakan nasional dan teknologi digital, mendukung aspirasi peningkatan PAD dengan mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif melalui kebijakan investasi ramah investor.
<i>Opportunities – Results</i> (OR)	Pemanfaatan peluang diversifikasi sektor, terutama pariwisata dan industri kreatif, mempercepat pencapaian hasil berupa peningkatan PAD berkelanjutan, kepatuhan pajak, dan penciptaan lapangan kerja.
<i>Aspirations – Results</i> (AR)	Aspirasi kemandirian fiskal menghasilkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang dapat diukur melalui kenaikan PAD, jumlah investasi, dan tingkat kepatuhan pajak.

Sumber : Data diolah 2025.

Tabel analisis SOAR dan tabel hubungan antar komponennya menunjukkan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi hanya dapat dicapai melalui pemanfaatan sinergis antara kekuatan internal dan peluang eksternal yang sejalan dengan aspirasi pembangunan daerah. Sinergi antara potensi pertanian dan pariwisata dengan dukungan kebijakan nasional, desentralisasi fiskal, serta kemajuan teknologi digital merupakan elemen kunci dalam memperluas basis PAD. Strategi ini akan semakin efektif apabila diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan, konsistensi kebijakan, dan penciptaan kepastian hukum yang menumbuhkan kepercayaan investor, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengembangan sektor pariwisata berbasis ekowisata menempati posisi strategis sebagai pilar utama diversifikasi PAD. Kabupaten Sigi memiliki bentang alam pegunungan, air terjun, dan keanekaragaman hayati yang berpotensi besar untuk ekowisata. Pengelolaan potensi ini perlu diintegrasikan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal. Pembelajaran dapat diambil dari praktik Kabupaten Banyuwangi yang melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 berhasil meningkatkan penerimaan pajak hotel, restoran, dan retribusi pariwisata melalui tata kelola destinasi wisata yang terencana. Penelitian Ariani dan Utama (2022) di Bali serta Patendeng dkk. (2023) di Kabupaten Toraja Utara menguatkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata terbukti memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD kabupaten/kota. Dengan mencontoh keberhasilan ini, Sigi dapat merancang regulasi turunan dan insentif khusus yang mendukung pengelolaan pariwisata berkelanjutan, sekaligus menekan ketergantungan fiskal terhadap pendapatan transfer pusat.

Di samping pariwisata, penguatan sektor pertanian berbasis komunitas menjadi prioritas strategis. Lahan pertanian subur dan keunggulan komoditas hortikultura maupun perkebunan di Sigi berpotensi memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pasar domestik dan ekspor. Penguatan sektor ini menuntut kebijakan yang mendorong produktivitas, akses pembiayaan, dan modernisasi manajemen usaha tani. Kemitraan dengan koperasi dan kelompok tani akan membantu memperluas basis pajak secara alami, mengingat modal sosial masyarakat Sigi yang kuat dalam tradisi gotong royong dan kelembagaan komunitas. Model ini selaras dengan teori *endogenous growth* (Romer, 1990; Lucas, 1988) yang menekankan peranan akumulasi modal manusia dan inovasi lokal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain pengembangan sektor riil, digitalisasi pemungutan pajak dan perizinan investasi menjadi faktor krusial untuk menekan kebocoran penerimaan, meningkatkan transparansi, dan menurunkan biaya transaksi. Praktik di Kota Makassar menunjukkan bahwa penerapan aplikasi PAKINTA (Helmi Barraq dkk., 2023) berhasil meningkatkan kepatuhan pajak dan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Kabupaten Sigi dapat mengadaptasi praktik serupa untuk mendukung pemungutan pajak yang efisien dan berbasis teknologi, selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang mendorong digitalisasi perizinan investasi.

Lebih jauh, percepatan penyusunan kebijakan turunan dan pemberian insentif investasi perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor. Pemerintah Kabupaten Sigi dapat mengacu pada praktik Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta pada Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa kejelasan insentif fiskal dan kemudahan perizinan merupakan

faktor penting dalam meningkatkan minat investasi sektor prioritas, termasuk sektor pariwisata dan industri kreatif.

Keberhasilan strategi kebijakan investasi tidak hanya bergantung pada jumlah investasi, melainkan juga pada kualitas tata kelola fiskal dan manajemen keuangan daerah. Penelitian Antonia Klara dkk. (2021) di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa peningkatan investasi melalui aset tetap dan penyertaan modal tidak otomatis meningkatkan PAD jika tidak disertai pengelolaan dan regulasi yang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sigi perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan memastikan konsistensi implementasi kebijakan agar investasi yang masuk benar benar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pendukung investasi seperti akses transportasi menuju sentra pertanian dan kawasan wisata menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya tarik investasi, menurunkan biaya logistik, dan mempercepat realisasi investasi produktif. Infrastruktur yang baik akan mempermudah mobilitas barang, jasa, dan wisatawan, sehingga secara langsung meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi.

Seluruh langkah strategis di atas hanya dapat berjalan optimal apabila diiringi dengan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Sinkronisasi ini penting agar kebijakan investasi di Sigi tetap sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk desentralisasi fiskal dan pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi multi pihak akan memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah secara fiskal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Dengan implementasi strategi tersebut secara konsisten dan berbasis bukti, perancangan kebijakan investasi Kabupaten Sigi akan mampu memperkuat peningkatan PAD secara berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya tahan. Secara keseluruhan, strategi ini selaras dengan visi “Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata Maju,” sekaligus memperkuat fondasi kemandirian fiskal dan memperluas basis pajak daerah dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Kebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi memiliki signifikansi strategis dalam penguatan kapasitas fiskal daerah dan pencapaian kemandirian keuangan yang berkelanjutan. Regulasi yang telah diterbitkan, baik pada tingkat Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, menunjukkan komitmen institusional pemerintah daerah dalam mengarahkan arus investasi ke sektor-sektor prioritas, khususnya pertanian dan pariwisata. Kedua sektor ini memiliki basis keunggulan komparatif yang mampu menghasilkan efek pengganda terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, penciptaan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat gap implementasi antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaan. Sektor nontradisional seperti pariwisata alam dan industri kreatif, belum didukung oleh kerangka teknis yang memadai, baik dari aspek diversifikasi kebijakan, pedoman operasional, maupun efektivitas koordinasi antarperangkat daerah. Hasil analisis SOAR mengindikasikan bahwa efektivitas perancangan kebijakan investasi akan meningkat apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kekuatan internal (potensi pertanian, pariwisata, dan modal sosial masyarakat) serta memanfaatkan peluang eksternal, termasuk dukungan kebijakan nasional, desentralisasi fiskal, dan perkembangan teknologi digital.

Implikasi dan Saran

Temuan penelitian memberikan implikasi praktis dan strategis bagi penguatan kebijakan investasi di Kabupaten Sigi. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tata kelola fiskal melalui penguatan regulasi turunan, penerapan mekanisme insentif investasi yang lebih kompetitif, serta pengembangan sistem informasi dan digitalisasi pemungutan pendapatan daerah. Kedua, peningkatan infrastruktur pendukung investasi menjadi prasyarat penting untuk memperbesar daya tarik investasi dan memperkuat integrasi sektor pertanian dan pariwisata dengan kegiatan ekonomi lokal.

Dari sisi kelembagaan, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah melalui mekanisme kolaboratif dan forum investasi yang mampu menyinergikan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Secara strategis, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, integritas tata kelola, dan kapasitas adaptif pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi. Dengan penerapan strategi berbasis potensi unggulan, Kabupaten Sigi berpeluang memperkuat kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi landasan penting dalam mencapai visi “Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata Maju,” serta memastikan keberlanjutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R., Putra Nugraha, D., Widya Nirwana, C., Titania Aurelia Mulia, C., & Atara, I. (2025). Governance of Investment in Tangerang Region Review of State Administrative Law: Tata Kelola Investasi Daerah Tangerang Tinjauan Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(2), 163–187. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i2.43000>
- Ariani, I. P., & Utama, I. W. M. (2022). Pengaruh sektor pariwisata dan pertumbuhan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.35794/emba.9.1.2021.32194>
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi ke-5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2018). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan (Edisi ke-6)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lestari, D., & Widodo, S. (2021). Pengaruh investasi sektor pariwisata terhadap penerimaan PAD kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(2), 89–101.
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muliana, S., Israwati, I., & Basar, N. F. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Tangible Journal*, 9(2), 315–327. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i2.551>
- Mulyani, S., & Setiawan, H. (2020). Dampak kebijakan penanaman modal terhadap pertumbuhan PAD: Studi kasus Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 8(1), 55–70.

- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian* (Edisi ke-7). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhadi. (2018). Optimalisasi peran BUMD sebagai instrumen investasi publik terhadap PAD. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 10(2), 101-115. <https://dspace.uii.ac.id/123456789/31265>
- Patendeng, F., Rantetampang, P., & Sumual, F. (2023). Analisis kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 23(2), 145-159.
- Putri, L., & Darmawan, R. (2020). Pengaruh pengembangan ekowisata berbasis komunitas terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 14(1), 33-47.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.
- Siahaan, M. P. (2020). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Stavros, J., & Hinrichs, G. (2009). *The Thin Book of SOAR: Building Strengths-Based Strategy*. Bend, OR: Thin Book Publishing.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi ke-4). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiyowati, N., Harianto, H., Priyarsono, D. S., & Tambunan, M. (2010). Dampak investasi pendidikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota di Jawa Tengah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 6(2), 158-170.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Wahyuni, F., Wandu, W., Muhsin, M., & Syarifuddin, S. (2024). Kajian Akademik Dari Sudut Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 10(1), 9-20. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i1.362>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.